

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijalankan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan. Dalam proses ini, kampanye menjadi ruang bagi partai politik untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, termasuk dilingkungan perguruan tinggi. Namun, keterlibatan partai politik dalam kampanye kampus sering kali menimbulkan perdebatan terkait netralitas institusi pendidikan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kampanye tidak melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye Pilkada oleh partai politik di perguruan tinggi Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *vague of norm*, dan pendekatan sosiologi hukum dan secara konseptual bersumber dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya disimpulkan dalam proses analisa data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengawasan kampanye Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Mojokerto pada perguruan tinggi, serta efektivitas penerapan pengawasan ditinjau dari beberapa pendekatan, yang diantaranya yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses masih terdapat beberapa komponen yang belum efektif.

Kata Kunci: Bawaslu, Kampanye Pilkada, Perguruan Tinggi Mojokerto